Retorik • *Vol. 13(1), 2025*
DOI: 10.24071/ret.v13i1.12865

Editorial

p-ISSN: 1412-6932
e-ISSN: 2549-2225

Menemukan Kembali Resonansi

St. Sunardi

Jurnal *Retorik* edisi ini dimaksudkan untuk memperingati 25 tahun Program Magister Ilmu Religi dan Budaya (IRB) yang kini disebut Program Magister Kajian Budaya (KB). Prodi ini secara resmi berdiri pada tahun 1999, namun baru pada tahun 2000 menerima mahasiswa, dan setahun kemudian, tepatnya September 2001, Jurnal *Retorik* terbit. Edisi perdana diluncurkan di Kompleks Gedung Realino, Kampus 2 Universitas Sanata Dharma, dengan pembicara yang terdiri dari almarhum Dr. Th. Sumartana (salah seorang penggagas berdirinya IRB), Dr. Gerry van Klinken (antropolog), dan Teuku Kemal Pasya (mahasiwa IRB angkatan pertama). Kemunculan jurnal itu dimaksudkan sebagai media pendukung prodi baru agar bisa mengomunikasikan pergumulan orang-orang yang terlibat dalam prodi baru ini yang sedang mencari dan mengembangkan model kajian humaniora yang lebih relevan pada waktu itu. Kegelisaan dan optimisme komunitas IRB tercermin dalam tulisan-tulisan edisi perdana ini. Dalam perjalanannya, prodi ini secara resmi memang menggunakan nama Kajian Budaya dan dalam praktiknya secara keilmuan juga dekat dengan tradisi Kajian Budaya. Akan tetapi, pada mulanya semangat awalnya tidak lain adalah pengembangan keilmuan humaniora. Bahkan tradisi Kajian Budaya pun juga dipilih karena tujuan awal tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Jurnal *Retorik* ini sejak awal disebut *Jurnal Ilmu Humaniora*.

Penggunaan nama "Retorik" itu sendiri sempat dipersoalkan dan ditolak oleh pimpinan Universitas Sanata Dharma waktu itu, yaitu almarhum Dr. M. Sastrapratedja, S.J. Ketika beliau datang ke kantor kami dan kami sodori *dummy* calon jurnal baru dengan nama *Retorik*, wajahnya memancarkan rasa tidak suka dan menyatakan bahwa apakah tidak ada nama lain, karena nama "retorik" sering dikaitkan dengan omongan bombastis tanpa makna. Bisa jadi beliau teringat "retorik" yang hanya dipraktikkan sebagai "*public speaking*" di Jurusan Bahasa Indonesia yang kebetulan diampu oleh salah seorang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Oleh karena itu, Wakil Rektor ini juga hadir

© 2025 St. Sunardi
This article is distributed under Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

dalam peluncuran *Retorik* perdana!). Dengan sekuat tenaga, kami menjelaskan bahwa "retorik" merupakan sesuatu yang serius dan bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mengembangkan kajian humaniora baru sambil melihat tradisi humaniora klasik. Selama kurang lebih satu minggu, kami menanti jawaban dari Rektor, apakah nama ini bisa dipakai atau haruskah kami mengganti dengan nama yang sudah klise. Suatu siang, di luar dugaan, Rektor waktu itu datang ke ruang kerja kami dengan wajah yang sulit kami tebak: wajah menyetujui atau menolak. Dia sama sekali tidak bicara sepatah kata pun tentang persoalan nama *Retorik* yang sudah kami tunggu-tunggu. Kami waktu itu sudah siap dengan kemungkinan terburuk, yaitu ditolak. Beliau hanya menyerahkan sejumlah fotokopian buku-buku dan artikel tentang retorik. Setelah itu, beliau pergi dengan tersenyum. Begitulah cara Rektor merestui dan mendukung kami. Ini sebuah restu sekaligus tanggung jawab untuk belajar lebih dalam tentang retorik!

Cerita di atas menggambarkan suasana kegiatan dan komunikasi yang melahirkan Jurnal *Retorik* dan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya. Suasana ini ditandai dengan adanya semangat kuat untuk belajar bersama dan hampir tidak ada seorang pun yang merasa tahu akan apa yang sedang dan akan dilakukan dalam prodi baru ini! Semangat saling belajar ini antara lain ditandai dengan saling tukar fotokopian buku baru yang relevan untuk prodi baru ini. Salah satu model komunikasi saling belajar antara lain ditunjukkan oleh Rektor di atas. Kami sangat mengapresiasi cara Rektor merespons, mengkritik, dan akhirnya mendukung apa yang kami usulkan. Dia tidak menggunakan cara kekuasaan, melainkan cara orang-orang yang sedang belajar bersama. Kalau dilihat ke belakang, cara-cara semacam inilah yang sebenarnya mewarnai dan menjadi kekuatan dalam pendirian prodi baru dan jurnal ini.

Antara Kajian Budaya dan Kajian Humaniora

Penggunaan istilah Ilmu Humaniora atau Kajian Humaniora itu bukannya tanpa alasan. Secara eksternal (dengan merujuk pada peraturan pemerintah), nama Kajian Budaya tidak bisa diterima. Nama ini ditolak karena tidak ada nomenklatur Kajian Budaya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Menurut para pejabat DIKTI, bidang Kajian Budaya sudah masuk dalam bidang-bidang seperti Antropologi Budaya, Sosiologi Budaya, dan sebagainya. Mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0314/P/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional, ada

Program Sarjana Ilmu Sastra dan Filsafat; waktu itu sempat ada usul dari DIKTI agar memberi nama Program baru ini sebagai Program Magister Filsafat. Tentu kami menolak, karena bukan itu isinya. Akhirnya, dipilih nama Program Studi Ilmu Religi dan Budaya dan masuk di bawah nomenklatur Kajian Humaniora. Secara internal, nama ini dipilih karena waktu itu identitas keilmuan program studi ini benar-benar masih dalam proses mencari. Dilihat dari kurikulum, program studi ini merupakan hasil "*merger*" antara Kajian Religi dan Kajian Budaya. Memang secara struktur, prodi ini lebih dekat pada Kajian Budaya. Sebagai jalan tengah, prodi ini menempatkan dirinya sebagai prodi yang sedang ikut mengembangkan Kajian Humaniora yang berkembang di Universitas Sanata Dharma maupun di perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Apakah dalam perjalannya akan dekat ke Kajian Budaya atau ke model lain dari Kajian Humaniora atau bentuk lainnya, prodi ini masih terbuka. Prioritas utama pada waktu itu adalah bahwa secara kelembagaan prodi ini harus aman, artinya boleh berdiri; setelah itu secara keilmuan identitasnya dicari sambil belajar!

1. Semangat ini jelas tampak pada edisi perdana Jurnal *Retorik*. Edisi ini mencerminkan ajakan prodi ini untuk melihat kembali Kajian Humaniora. Dengan melaporkan hasil konferensi bertajuk "University for New Humanism", kami pertama-tama mau menunjukkan bagaimana humanisme lama atau humanisme klasik yang dianut di lembaga ini (entah sadar atau tidak sadar) perlu dipersoalkan.[1] Jadi, semangat awal dari edisi perdana sejalan dengan semangat prodi, yaitu semangat mempersoalkan atau mengkritisi. Kami tidak ragu-ragu banyak menggunakan jargon seperti humanisme atau humaniora, karena pada dasarnya kami justru sedang menginterogasi sejauh mana kita semua tahu dan sadar dengan semua jargon itu. Cara ini menjadi cara lain untuk menyapa teman-teman dari prodi lain seperti Sastra, Sejarah, Psikologi, Pendidikan, dan sebagainya.
2. Kami juga memperluas area pembahasan tentang humanisme dan humaniora sampai pada wilayah yang barang kali tidak banyak dibayangkan orang pada waktu itu. Yaitu, kami mengajak membahas *Ratio Studiorum* Serikat Jesus, karena dokumen ini juga menandai lahirnya (kembali) humanisme klasik. Kebetulan, kami mendapatkan momen menarik untuk mendiskusikannya, yaitu saat USD merayakan Pesta Emas tahun 2005. Dengan cara ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mengunyah kembali apa yang

[1] J. Bismoko, "*University for New Humanism:* Laporan Konferensi Jubilium Para Pemimpin Universitas, Roma 8-11 September 2000," *Retorik* 1, no. 1 (2001): 20–7.

kita semua miliki. Hanya dengan cara inilah, humanisme atau humaniora bukan hanya menjadi jargon, melainkan menjadi pengalaman empiris lagi, menjadi intensitas, dan dalam tingkat tertentu menjadi resonansi.

3. Dengan bekal mengalami kembali dan mengingat kembali tentang humanisme dan humaniora sebagaimana dijelaskan di atas, kami berhubungan dengan Kajian Budaya. Jadi, menjalankan Kajian Budaya tanpa kita mengingat kembali Kajian Humaniora rasanya absurd. Sebaliknya, berkenalan dengan Kajian Budaya sambil mengunyah kembali tradisi Kajian Humaniora bisa mengingatkan kembali berbagai perspektif yang hilang. Pengalaman ini sangat menarik ketika kami membaca ulang literatur lama seperti ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara dan Kartini. Misalnya, dari satu sisi Ki Hadjar sangat mengagumi tradisi seperti batik. Akan tetapi, secara mengejutkan dia menolak batik sebagai seragam nasional, karena produksi batik hanya memiskinkan para pembatik dan mengayakan para pemilik modal! Hal serupa disuarakan oleh Kartini ketika dia bicara tentang tradisi Jawa.
4. Dengan cara ini, kami tidak memperlakukan Kajian Budaya sebagai—meminjam Istilah Roland Barthes—karya (*work*), melainkan sebagai teks. Maksudnya, Kajian Budaya bukan sebagai sesuatu yang utuh, melainkan sebagai potongan-potongan kutipan yang bisa kita baca sesuai dengan selera kita. Demikian juga berlaku pada Kajian Humaniora. Dengan menemukan kembali Kajian Humaniora, kami mencairkan kembali Kajian Humaniora. Dengan cara ini, kami berusaha menjadikan prodi ini lahir sebagai arena yang cair di mana kami bisa melahirkan jejak-jejak pengalaman kami sendiri.

Perlu dicatat di sini, bahwa baik pada persiapan berdirinya Program ini maupun pada awal perjalannya, kami juga sangat dipengaruhi oleh semangat Michel Foucault sebagaimana dituangkan dalam karyanya *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. Alasannya sudah cukup jelas. Barang siapa mengaku menjalankan ilmu-ilmu kemanusiaan atau mengaku mau memperbarui ilmu-ilmu kemanusiaan, orang tidak bisa menutup mata pada paparan Foucault yang menggambarkan bagaimana kategori manusia itu muncul dan lenyap lagi dalam wacana ilmu-ilmu kemanusiaan modern.

Menelisik Jejak-jejak Kajian Humaniora

Bagaimanakah wajah Kajian Humaniora atau Kajian Budaya sebagaimana diperjuangkan, baik oleh prodi ini maupun oleh Jurnal *Retorik* selama kurang lebih 25 tahun? Tentu sangat tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, untuk memberikan gambaran umum tentang profil Kajian Humaniora tersebut, Jurnal *Retorik* edisi ini menerbitkan enam tulisan dari para alumni yang berasal dari angkatan perdana (2000), angkatan 2003, angkatan 2005, dan angkatan 2014. Para alumni ini diminta untuk menulis sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang mereka geluti. Kegiatan atau profesi yang mereka kerjakan bervariasi, ada yang bekerja sebagai peneliti di BRIN, Jakarta (M. Alie Humaedi); konsultan komunikasi di Yogyakarta (Nur Imroatus Sholikhah); wartawan lepas di Jakarta (Linda Yulisman); dosen di Jerman (Ferdiansyah Thajib); seniman sekaligus dosen dan mahasiswa di Australia (Malcolm Le Smith); dan seniman-mahasiswa di Amsterdam (Timoteus Anggawan Kusno). Tentu saja, para alumni ini tidak mewakili para lulusan dan memang tidak dimaksudkan untuk itu. Demikian juga, kami tidak berpretensi bahwa tulisan mereka ini mencerminkan perkembangan prodi kami. Prodi ini hanya bisa berbagi kegelisahan dan pencarian bersama. Sebaliknya, lewat tulisan-tulisan mereka, kami justru ingin bercermin, berefleksi, dan belajar untuk meningkatkan diri. Berdasarkan keenam tulisan ini, paling tidak ada empat kecenderungan atau tendensi yang perlu ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam kaitannya untuk mengembangkan Kajian Humaniora lintas-ilmu atau Kajian Budaya. Keempat kecenderungan itu meliputi kecenderungan mencari konteks politis-ekonomis, oto-kritik pada ilmunya sendiri, keberpihakan pada kelompok marginal secara mendalam, dan seni sebagai praktik pengetahuan. Walaupun telaah atas keempat kecenderungan dalam tulisan ini belum tuntas, keempat kecenderungan itu pada dirinya bisa dianggap sangat berharga karena lahir dari bagian sejarah prodi ini.

Mencari konteks ekonomis-politis

Di tengah-tengah jargon "kemandirian pangan" yang terus digelorakan sejak zaman Soeharto sampai hari ini, kita justru menghadapi fenomena masyarakat petani yang cenderung menjual tanahnya, dan bahkan tanah ini kemudian bisa berubah menjadi "tanah hantu" atau seolah-olah tanah tak bertuan. Artinya, tanah-tanah itu bisa cenderung mangkrak atau bisa diperebutkan karena pembeli akhir dari luar daerah sudah tidak bisa dilacak lagi. Bukankah ini sebuah kenyataan yang satiris? Yaitu, kenyataan yang seakan

sedang mengolok-olok kita sendiri? Sementara di sejumlah daerah muncul tanah hantu, pemerintah mencaplok hutan-hutan di Kalimantan dan Papua untuk *food estate*. Inilah salah satu reaksi yang muncul ketika kita membaca tulisan M. Alie Humaedi dan Aliena Anaqu Arung Pasisir berjudul "Tanah Hantu (*Absentee*) sebagai Simtom Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Lombok Timur". Menurut hasil penelitian Humaedi dan Pasisir, kecenderungan menjual tanah itu dipengaruhi oleh faktor tingginya harga tanah sebagai akibat dari adanya sejumlah Proyek Strategi Nasional seperti Mandalika, dan di sisi lain semangat para petani untuk bercocok tanam semakin merosot karena berbagai alasan. Jadi, tansformasi ruang yang terjadi di desa-desa secara sepintas menggambarkan gemerlapan proyek-proyek mecusuar, namun dari sisi lain justru menggambarkan kemiskinan dan pemiskinan orang-orang desa. Begitulah penelitian ini mencoba menelusuri di balik simtom tanah hantu.

Fenomena serupa juga kita jumpai lewat tulisan Linda Yulisman, "From Tailor Shops to Factories: Rethinking Upgrading and Labor Role in Indonesia's Trade with the World". Tulisan ini menyoroti paradoks yang ia saksikan dalam pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun. Secara ekonomis, memang terjadi *economic upgrading* berkat peningkatan ekspor yang antara lain didukung oleh sektor industri tekstil dan garmen. Akan tetapi, Linda mengamati bahwa peningkatan ekonomis ini ternyata tidak diikuti dengan *social upgrading*. Yaitu, pemenuhan akan kebutuhan hak-hak dasar para buruh. Mirip dengan proyek mercusuar yang mempercepat komodifikasi tanah pertanian dan berakibat pemiskinan, sektor ini juga terjadi semacam proyek mercusuar berupa ekspor dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun tidak disertai dengan *social upgrading*, atau, boleh kita sebut, kesejahteraan sosial. Menariknya, dalam konteks ini, negara yang seharusnya bertanggung jawab ikut melindungi rakyatnya dari hubungan eksploitatif dengan perusahaan, justru menjadi bagian ekploitasi secara legal. Tidak hanya mengherankan bahwa secara politis kelompok buruh juga mengalami pelemahan bila dibandingkan pada sebelum tahun 2014.

Dua penelitian ini menarik, karena penelitian ini berhasil membuat kita untuk tidak terkecoh dengan laporan-laporan pemerintah yang cenderung berbau *success story*, sementara terjadi proses pemiskinan, baik secara ekonomis maupun sosial, yang tidak kasat mata. Penelitian ini juga didukung dengan data yang memadai dan analisisnya yang meyakinkan. Untuk konteks diskusi kita, penelitian ini menarik karena menyisakan ruang terbuka bagi peneliti sendiri atau bagi kita semua untuk melihat secara dekat dan kualitatif, mi-

salnya pada robohnya etos bertani maupun kondisi hidup para buruh yang mengalami degradasi. Budaya pedesaan macam apa yang lahir dari masyarakat yang melepaskan tanahnya? Demikian juga, bagaimana negara dan perusahaan "mengelabui" para buruh sehingga mereka secara "sukarela" memberi subsidi produksi barang-barang ekspor?

Oto-kritik pada ilmunya sendiri

Terus terang, agak di luar dugaan bagi saya, melihat masih ada seorang alumna prodi ini yang berani mengkritisi ilmu (dalam hal ini Kajian Komunikasi) yang sedang dipelajarinya. Memang, Nur Imroatus Sholikhah sempat studi di Jurusan Ilmu Komunikasi. Jenis kritik semacam ini memang mewarnai generasi awal mahasiswa Prodi Kajian Budaya. Di kalangan generasi awal, para mahasiswa tidak hanya mempelajari kisah kelahiran Kajian Budaya yang lahir sebagai bentuk pemberontakan teradap Sastra Inggris, tapi juga menempatkan Kajian Budaya dalam perkembangan Ilmu Sosial Kemanusiaan di Indonesia sejak dari Indologie sampai dengan tahun 1990-an. Kajian ini dilakukan sangat mendalam dan detail sampai para mahasiswa melihat betapa besar efek praktik keilmuan itu bagi kehidupan bersama. Jadi, kritik bukan demi kritik itu sendiri, melainkan menjadi momen penting untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan sebagai semacam rutinitas serta mengukur sejauh mana apa yang dilakukan itu bisa melahirkan berbagai intensitas kehidupan.

Dalam tulisan "'Redupnya' Pesan dan 'Menguatnya' Informasi: Refleksi Komunikasi sebagai Sistem Seleksi" ini, saya menangkap pancaran kritis dan optimistis sebagaimana saya sebut di atas. Dari satu sisi, Imroatus mengajak kita semua untuk meninjau kategori "komunikasi" yang selama ini dikaitkan dengan penyampaian pesan dari pengirim dan penerima, dan mengajak kita untuk mengaitkan komunikasi dengan informasi. Perdebatan semacam ini sesungguhnya sudah lama, namun kini menjadi lebih relevan terutama kalau dikaitkan pengalaman kita semua dengan perkembangan teknologi digital. Dalam pengalaman tersebut, kita pertama-tama tidak lagi melihat siapa mengirim apa pada siapa, melainkan kita berhadapan dengan informasi jenis apa. Dari sisi lain, tulisan ini menjanjikan bahwa dengan cara pandang baru ini, kajian komunikasi bisa melihat persoalan sosial dengan cara yang lain sama sekali. Di sini, Imroatus mengkritisi komunikasi, semisal model Habermas, yang barang kali masih sangat dominan hingga kini. Dengan melihat komunikasi sebagai persoalan seleksi informasi dan cara pemaknaannya,

tidak mengherankan yang dibutuhkan adalah cara bagaimana supaya orang memiliki kapasitas memilih.

Dalam kaitannya dengan Kajian Humaniora, tulisan semacam ini sangat menarik karena mengajak kita untuk meneliti dan merefleksikan secara lebih mendalam salah satu sumber pengalaman akan pascamanusia yang kini sedang banyak dibicarakan. Maksudnya, tulisan ini membuka ruang untuk meninjau kembali pengalaman kita akan subjekvitas dan agensi. Secara khusus, tentu saja kita harus tahu lebih dekat tentang sistem sosial yang lahir lewat teknologi digital terlepas dari "beban" kesadaran sosial.

Keberpihakan pada kelompok marjinal secara tuntas

Sejauh ini, di prodi ini maupun dunia akademik pada umumnya, dengan mudah orang mengatakan perlunya berpihak pada kelompok-kelompok rentan dan tersingkir. Jargon ini dengan mudah dan cepat dipatahkan oleh tulisan Ferdiansyah berjudul "Selaras Tapi Tak Setara: Tegangan Antara Kajian Queer dan Kajian Budaya di Indonesia". Tulisan ini menarik, karena baik Kajian Budaya maupun Kajian Queer itu keduanya ditandai dengan keberpihakan. Secara umum, Ferdiansyah mengatakan bahwa sejauh ini Kajian Queer masih berdiri sebagai anak tiri dalam Kajian Humaniora. Dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, bidang ini paling kurang banyak mendapatkan perhatian.

Seperti disinggung dalam artikel ini, persoalan *queer* di prodi ini memang masih dimasukkan ke dalam Kajian Gender. Dengan sendirinya, porsi dan kedalamannya pasti kurang. Sebetulnya pernah diselenggarakan perkuliahan dalam bentuk seminar tentang Seksualitas yang sebagai langkah awal membaca secara mendalam *The History of Sexuality*. Dari perkulihan ini, sebenarnya diperoleh pengalaman tentang wacana seksualitas yang tak terbayangkan sebelumnya. Seminar ini terhenti dan Kajian Queer dimasukkan ke dalam Kajian Gender. Saya sepenuhnya setuju pada Ferdiansyah bahwa kondisi ini memang membuat Kajian Queer diperlakukan seperti anak tiri.

Apa yang dikeluhkan oleh Ferdiansyah bisa menyambung apa yang ditulis oleh Malcolm Le Smith dengan judul "Gairah Tabu: Re-imagining Indonesia through Pornography". Secara umum, tulisan ini membahas pembentukan subjek lewat apa yang dia sebut teknologi. Tulisan ini hendak membalik pandangan umum selama ini bahwa seolah-olah subjek sudah ada terlebih dahulu. Bertitik tolak dari gagasan ini, Malcolm mengamati berbagai jenis teknologi, terutama yang berkembang di Indonesia seperti teknologi ibuisme

zaman Orde Baru, sampai dengan teknologi romansa dan pornografi lewat media sosial. Dalam perkembangan teknologi yang lebih beragam ini, juga memberi keluasan berbagai subjek yang dihasilkan, termasuk di dalamnya kelompok LGBT. Akan tetapi, ternyata kekuatan tuntututan heteronormatif sebagaimana disponsori oleh negara sejak Orde Baru cenderung melihat dirinya sebagai yang normal. Kenormalan ini juga dihidupkan kembali selama pemilu.

Dengan mempertimbangkan kegelisahan Malcolm ini, kita melihat semakin pentingnya apa yang disuarakan oleh Ferdiansyah tentang perlunya Kajian Queer yang lebih fokus, serius, mendalam, dan tidak semata-mata dicantelkan pada Kajian Gender. Jaringan pengetahuan yang memadai dan praktiknya di berbagai kelompok sosial dalam masyarakat pada gilirannya bisa menjadi semacam teknologi baru yang bisa melahirkan subjek-subjek baru pula.

Praktik seni sebagai pengetahuan

Tendensi terakhir bisa disebut sebagai seni sebagai praktik pengetahuan sebagaimana kita baca dalam tulisan Anggawan Kusno berjudul "Reversal: The Colonial Afterlife and Nostalgia". Tulisan ini tidak bisa dilepaskan dari praktik berkesenian Angga selama ini. Seni di sini secara jelas dipraktikkan untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman penjajahan. Angga mengeksplorasi berbagai pengalaman paradoks yang dijumpai oleh orang-orang yang ingin membebaskan diri dari kolonialisme, melainkan secara dramatis justru malah terperosok pada apa yang hendak dihindari. Dalam konteks ini, seni dipakai oleh Angga untuk membicarakan dan mempraktikkan sejarah, khususnya sejarah penjajahan dan sesudahnya. Sangat menarik diperhatikan bahwa bagi Angga, masalah sejarah bukan hanya persoalan mengingat, melainkan juga persoalan merasakan. Ini merupakan suatu pernyataan yang berani, karena sejauh ini setiap kali orang bicara tentang sejarah, orang bicara tentang ingatan, dan orang yang mengabaikan sejarah dianggap mengalami amnesia sejarah. Dengan memasukkan kategori rasa atau merasakan ke dalam sejarah; persoalan penjajah, dijajah, zaman kolonial, pasca-kolonial, menjadi lebih cair. Dari sanalah orang bisa melahirkan imajinasi baru tentang sejarah penjajahan maupun pasca-jajahan.

Apa yang dilakukan Angga merupakan salah satu pergumulan yang dilakukan di prodi ini. Ada periode di mana prodi ini banyak diwarnai dengan kajian gerakan masyarakat sipil, dan ada pula periode diwarnai dengan kajian

seni sampai akhirnya melihat seni sebagai praktik pengetahuan. Kemunculan seni sebagai praktik pengetahuan ini sesungguhnya merupakan bagian dari kritik atas model pengetahuan modern yang selama ini dijalankan sebagai kegiatan forensik (seperti kegiatan yang dilakukan dalam dunia pengadilan) ke model pengetahuan sebagai kegiatan untuk mencari kebaruan. Praktik pengetahuan model kedua ini begitu mendesak bagi kita, terutama ketika pengetahuan direduksi ke kegiatan manajerial.

Dalam konteks cara melihat hubungan antara jajahan dan penjajah, cara melahirkan kabaruan secara fiktif namun produktif ini pernah dilakukan oleh Suwardi Suryaningrat (yang kemudian menjadi Ki Hadjar Dewantara) lewat tulisannya yang legendaris *Jika Aku Seorang Belanda*. Berkat tulisan fiksi itu, Suwardi (dan kita semua yang membacanya) bisa mengalami (bukan hanya mengetahui) semacam proto-nasionalisme yang kemudian bisa mejadi landasan bagi perjuangan nasional. Jadi seni, seperti dilakukan dan ditulis oleh Angga, bisa menjadi salah satu jalan untuk mendekati jenis-jenis hubungan yang penuh dengan paradoks ketika dibicarakan secara verbal guna membangun ingatan. Ruang rasa yang disediakan oleh seni bisa melahirkan sesuatu yang baru tak terduga.

Penutup: Sebuah Antisipasi

Tanpa bermaksud mau merumuskan suatu model Kajian Budaya atau Kajian Humaniora, dari sekelumit latar belakang kemunculan Jurnal *Retorik* dan Prodi Kajian Budaya serta bercermin pada sejumlah artikel dari para alumni; saya melihat sejumlah butir gagasan yang perlu dipikirkan kembali untuk memajukan Kajian Humaniora atau Kajian Budaya di prodi ini.

Pertama, walaupun banyak orang berbeda pandangan tentang paham kemanusiaan (humanisme) atau kategori manusia, sulit dipungkiri bahwa pada akhirnya kita semua masih tetap membutuhkan kategori, entah subjek atau individu, sebagai salah satu fungsi terpenting untuk mengelola hidup kita. Kategori subjek dan sejenisnya sepertinya masih dibutuhkan, hanya saja orang bisa saja mengajukan gagasan tentang pembentukan dan fungsinya.

Kedua, persoalan subjek itu bukan hanya relevan untuk isu, seperti diangkat oleh Ferdiansyah maupun Malcom (terutama ketika bicara tentang *self*), melainkan juga isu yang diangkat oleh Imroatus, terutama ketika dia akhirnya bicara tentang "kapasitas seleksi".

Ketiga, masih terkait dengan gagasan pertama dan kedua, kita sebetulnya membutuhkan penelitian lebih jauh tentang bagaimana teknologi tertentu melahirkan subjek tertentu pula, atau bagaimana pilihan-pilihan tertentu melahirkan subjek tertentu pula. Kalau muara gagasan pertama dan kedua barang kali lebih cenderung filosofis, gagasan ketiga ini barang kali lebih empiris. Singkat cerita, perdebatan tentang subjek bisa menjadi sangat empirik dan kontekstual, dan bukan hanya persoalan metafisis.

Keempat, kategori subjek, kedirian, dan semacamnya itu bisa lebih cair dibicarakan sejauh kita memberi ruang yang lahir dari seni sebagai praktik pengetahuan. Dalam ruang semacam ini, kita diharapkan masih bisa memberikan ruang bagi intensitas dan singularitas kehidupan dengan berbagai resonansinya. Tanpa ruang semacam ini, mustahillah kita memasuki area baru. Resonansi kehidupan ini sesungguhnya tidak hanya bisa diambil dari dunia seni, melainkan juga dari praktik hidup sehari-hari, seperti bidang kehidupan yang akhirnya mendorong orang melepaskan tanan pertanian mereka sehingga menjadi "tanah hantu".

Last but not least, ketika prodi ini berdiri, semua dari kita dibayang-bayangi konflik sosial-politik yang menyebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sulawesi, Maluku, sampai dengan Papua. Pengalaman itu begitu pahit sehingga membuat kita kehilangan kepercayaan diri sebagai bangsa. Komunitas IRB yang datang dari berbagai penjuru Indonesia menjadi miniatur masyarakat yang terluka atau pura-pura tidak terluka, sekaligus mencoba melihat masa depan sambil saling menyembuhkan. Dimensi masyarakat yang semacam ini memang secara sepintas tidak kelihatan dalam tulisan dan refleksi di atas. Akan tetapi, terus terang saya juga bertanya-tanya, jangan-jangan tulisan-tulisan yang disebut di atas juga mengandung bentuk lain dari konflik yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam prodi ini.

Daftar Pustaka

Bismoko, J. "*University for New Humanism:* Laporan Konferensi Jubilium Para Pemimpin Universitas, Roma 8-11 September 2000." *Retorik* 1, no. 1 (2001): 20–7.